

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***“Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023”*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

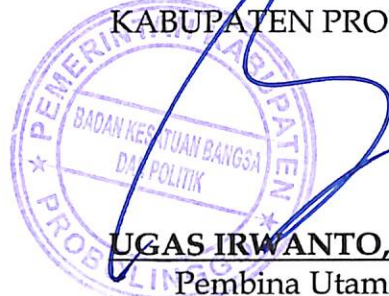
Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo,

2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 39

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahError! Bookmark not defined.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 62

BAB V PENUTUP 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyusunan Renja 2023 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 7a tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
28. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo 2023 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2021), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini, evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan Tahun 2021 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Hasil evaluasi capaian kinerja program kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C 29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo serta
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan)
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	08			URUSAN WAJIB									
1	08.01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (TAHUN ANGGARAN 2020)									
1	08.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75	74	-	-	-	-	-	-
1	05.01	01	24	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan dasar administrasi umum	75 %	100 %	-	-	-	-	-	-
1	05.01	01	25	Kegiatan Pelayanan Management Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses	75 %	100 %	-	-	-	-	-	-
1	05.01	01	26	Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	75 %	100 %	-	-	-	-	-	-

1	05.01	01	27	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan program yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	75 %	100 %	-	-	-	-	-	-
1	05.01	23		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ormas/Orsospol/LSM/ Masyarakat yang mendapat Pembinaan tentang Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	75%	100%	-	-	-	-	-	-
1	05.01	23	28	Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 kali	5 kali	-	-	-	-	-	-
1	05.01	23	29	Kegiatan Kewaspadaan Nasional	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Kewaspadaan Nasional	9 kali	9 kali	-	-	-	-	-	-
1	05.01	29		Program Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase Ormas/Orsospol/LSM/ Masyarakat yang mendapat Pembinaan tentang Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	75%	90,90%	-	-	-	-	-	-
1	05.01	29	01	Pengembangan Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan	21 kali	18 kali	-	-	-	-	-	-
1	05.01	29	02	Kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Pendidikan Politik	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Pendidikan Politik	12 kali	12 kali	-	-	-	-	-	-
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022)									
8	01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	-	81 Nilai	75,15 Nilai	92,77%	-	-	-
					Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5%	5%	5%
8	01.01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%	-	-	-
					Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%
8	01.01	2	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	01.01	2	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	01.01	2	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	01.01	2	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

8	01.01	2	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	2 kali	1 kali	50%	-	-	-
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	-	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100%
8	01.01	2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 kali	1 kali	50%	-	-	-
					Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100%
8	01.01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
					Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar tepat waktu	-	-	18 orang	18 orang	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
8	01.01	2	02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100%
8	01.01	2	02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	2 kali	1 kali	50%
8	01.01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	90%	90%	90%	-	-	-
					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
8	01.01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90%	90%	90%	-	-	-
					Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlayani	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang yang terlayani	-	-	90%	90%	90%	-	-	-
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-

					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	90%	90%	90%	-	-	-
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	01.01	2	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
					Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
8	01.01	2	09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan (pengadaan/ penyempurnaan) Aset Tak Berwujud	-	-	1 kali	1 kali	100%	0	0	-
8	01.02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	85%	85%	85%	90%	90%	90%
8	01.02	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	85%	85%	85%	-	-	-
					Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	90%	90%	90%
8	01.02	2	01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	4 kali	2 kali	50%
8	01.02	2	01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	3 kali	2 kali	66%	-	-	-
					Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
8	01.03			PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	85%	85%	85%	90%	90%	90%
8	01.03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	-	-	85%	85%	85%	-	-	-

				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
					Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	-	-	90%	90%	90%						
8	01.03	2	01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	-	4 kali	4 kali	100%	-	-	-						
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	-	-	-	-	10 kali	10 kali	100%						
8	01.03	2	01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	3 kali	3 kali	100%	-	-	-						
					Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	3 kali	2 kali	66%						
8	01.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	85%	85%	85%	90%	90%	90%						
8	01.04	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	85%	85%	85%	-	-	-						
					Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	90%	90%	90%						
8	01.04	2	01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	2 kali	2 kali	100%	-	-	-						
					Jumlah Sosialisasi terhadap Ormas/LSM/Toga/Tomas di bidang Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%						

8	01.04	2	01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
					Jumlah Ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
8	01.05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	-	88%	88%	85%	90%	90%	90%
8	01.05	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/ Tomas yang mendapat pembinaan tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	85%	85%	85%	-	-	-
					Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	90%	90%	90%
8	01.05	2	01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	4 kali	2 kali	50%	-	-	-
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	5 kali	4 kali	80%
8	01.05	2	01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	4 kali	2 kali	50%	-	-	-
					Jumlah Pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
8	01.06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-	-	88%	88%	85%	90%	90%	90%
8	01.06	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ormas/LSM/Toga/ Tomas yang mendapat pembinaan tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	85%	85%	85%	-	-	-
					Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	90%	90%	90%
8	01.06	2	01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	4 kali	1 kali	25%	-	-	-

				Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
					Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
8	01.06	2	01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	4 kali	1 kali	25%	-	-	-
					Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
8	01.06	2	01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	3 kali	1 kali	33%	-	-	-
					Jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan terkait Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	3 kali	3 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

N O	Indikator	SPM/standa r nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)			0,15	0,13	0,11	0,09	0,167	1	1	1	
2	Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan			86	87	88	89	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Penting tersebut dapat berupa informasi, kejadian, fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu permasalahan yang dapat diambil dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini antara lain:

1. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Berkembangnya Intoleransi;
3. Penguatan Wawasan Kebangsaan;
4. Penguatan Etika dan Budaya Politik;
5. Berkembangnya Hoax (Berita Bohong);
6. Berkembangnya Radikalisme;
7. Berkembangnya Penyalahgunaan Narkoba;
8. Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
9. Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing;
10. Peningkatan Partisipasi Politik;
11. Berkembangnya Konflik Sosial sejak Pandemi Covid-19 mewabah.

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua faktor strategis yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi,

sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sbb :

Lingkungan Internal

▪ **Kekuatan (Strengths) :**

- 1) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;
- 2) Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;
- 3) Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik;
- 4) Adanya koordinasi yang baik antar semua pihak;
- 5) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

▪ **Kelemahan (Weakness) :**

- 1) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 3) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga kurang dikenal masyarakat;
- 4) Job description yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain.

▪ **Peluang (opportunities) :**

- 1) Masih adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM;

- 2) Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi;
- 3) Pelaksanaan Pilkada serentak;
- 4) Gerakan masyarakat dalam mendukung empat konsesus nasional saat ini sedang berkembang pesat;
- 5) Gerakan Nasional Revolusi Mental.

▪ **Ancaman (Treaths) :**

- 1) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD;
- 2) Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang ASN;
- 3) Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat terutama konflik bermotif agama;
- 4) Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik secara politik maupun sosial;
- 5) Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila, terutama paham radikal internasional yang telah memasuki ruang lingkup Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Analisa SWOT seperti yang telah dijelaskan tersebut, maka alternatif strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan loyalitas aparaturnya untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait serta kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda;
2. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika Berbangsa dan Bernegara;
3. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik;
4. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban;
5. Peningkatan pemahaman HAM di jajaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban;
7. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan;
8. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis;
9. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Strategi di atas, merupakan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan maupun anggaran yang direncanakan antara rancangan awal terhadap hasil analisis kebutuhan. Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Probolinggo

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5 %	4.147.096.550,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5 %	4.147.096.550,00	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	123.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	123.000.000,00	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	70.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	70.000.000,00	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terusun	1 dokumen	7.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	1 dokumen	7.500.000,00	

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Perubahan RKA-SKPD			
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	1 dokumen	7.500.000,00	
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	4 kali	15.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	4 kali	15.000.000,00	
1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 kali	8.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 kali	8.000.000,00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	100 %	2.756.256.275,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	100 %	2.756.256.275,00	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.741.256.275,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.741.256.275,00	
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 kali	7.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 kali	7.000.000,00	

2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang diselesaikan	5 kali	8.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang diselesaikan	5 kali	8.000.000,00	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	202.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	202.000.000,00	
3.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	202.000.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	202.000.000,00	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	365.475.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	365.475.000,00	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	97.750.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	97.750.000,00	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	5.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	5.000.000,00	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	11.500.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	11.500.000,00	

4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	20.650.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	20.650.000,00	
4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	230.575.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	230.575.000,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	521.515.275,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	521.515.275,00	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12.275.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12.275.000,00	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	64.720.275,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	64.720.275,00	
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	98.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	98.000.000,00	
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	346.520.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	346.520.000,00	

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100 %	178.850.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100 %	178.850.000,00	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	103.850.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	103.850.000,00	
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pemeliharaan (pengadaan/penyempurnaan) Aset Tak Berwujud	1 kali	75.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pemeliharaan (pengadaan/penyempurnaan) Aset Tak Berwujud	1 kali	75.000.000,00	
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %	1.533.275.000,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %	1.533.275.000,00	
7	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	95 %	1.533.275.000,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	95 %	1.533.275.000,00	

	Karakter Kebangsaan		Kebangsaan			Karakter Kebangsaan		Kebangsaan			
7.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kali	455.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kali	455.000.000,00	
7.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 kali	1.078.275.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 kali	1.078.275.000,00	
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	95 %	3.716.825.000,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	95 %	3.716.825.000,00	

			Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
8	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	95 %	3.716.825.000,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	95 %	3.716.825.000,00	
8.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6 kali	2.616.825.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6 kali	2.616.825.000,00	

8.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 kali	1.100.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 kali	1.100.000.000,00	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	352.500.000,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	352.500.000,00	
9	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	352.500.000,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 %	352.500.000,00	
9.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Kabupaten Probolinggo	Jumlah sosialisasi terhadap Ormas/LSM/Toga/Tomas di bidang Kebijakan, dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	6 kali	180.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,	Kabupaten Probolinggo	Jumlah sosialisasi terhadap Ormas/LSM/Toga/Tomas di bidang Kebijakan, dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	6 kali	180.000.000,00	

	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Asing di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Asing di Daerah			
9.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 kali	172.500.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 kali	172.500.000,00	
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95 %	1.869.800.000,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95 %	1.869.800.000,00	
10	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	95 %	1.869.800.000,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	95 %	1.869.800.000,00	
10.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Kabupaten Probolinggo		8 kali	765.800.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	8 kali	765.800.000,00	

	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
10.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 kali	1.104.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 kali	1.104.000.000,00	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	95 %	515.400.000,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	95 %	515.400.000,00	
11	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis	95 %	515.400.000,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis	95 %	515.400.000,00	

	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
11.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 kali	320.100.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 kali	320.100.000,00	
11.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	Kabupaten Probolinggo	Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 kali	172.800.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	Kabupaten Probolinggo	Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 kali	172.800.000,00	

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
11.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan terkait Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 kali	22.500.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan terkait Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 kali	22.500.000,00	
11.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	200.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	200.000.000,00	
J u m l a h					12.334.896.550,00	J u m l a h					12.334.896.550,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, adalah Urusan pemerintahan umum, bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi :

- a. Meningkatkan kewaspadaan daerah dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, serta menghalau paham – paham radikalisme global;
- b. Menciptakan inovasi kegiatan dalam meningkatkan pemahaman tentang empat konsensus nasional kepada masyarakat, serta memelihara harmoni sosial dan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap etika politik.

Adapun Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Probolinggo**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/To mas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/To mas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kali	Usulan Hibah Lembaga KORPRI (tercantum pada Sub Kegiatan ini)
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/To mas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	95 %	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/To mas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan	95 %	

	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6 kali	Usulan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (tercantum pada Sub Kegiatan ini)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95 %	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	95 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	10 kali	Usulan Hibah dari Lembaga SATUAN PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (SATLAK

	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		P4GN) Kabupaten Probolinggo dan Usulan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyalagunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obatan (tercantum pada Sub Kegiatan ini)
--	---	--	---	--	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yang makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama POLRI melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya kelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagi aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin mantap serta profesionalisme aparatur negara baik di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang

optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, selaras dan seimbang. Terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap dan mental serta perilaku masyarakat dan semakin baiknya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh baiknya kerjasama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan pedesaan tercapai serta mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Selain itu, perkembangan infrastruktur pedesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan Nasional maka arah kebijakan pembangunan tahunan didasarkan pada 5 (lima) visi Presiden dan Wakil Presiden, yang akan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

3.1.2 KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. Visi Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**.

Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Sedangkan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi pembangunan adalah:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Adapun Strategi Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan;
2. Pembangunan berkelanjutan yang Inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future);
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengaruhutamaam Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (Right Based Development);

4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama, dan;
6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT)*.

Sedangkan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis argo guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

3.1.3 KETERKAITAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI DENGAN KEBIJAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Substansi pokok dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, capaian kinerja pemerintah daerah, kerangka ekonomi daerah, serta kebijakan kemampuan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan, maka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo juga memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yaitu :

1. Arah kebijakan pemerintah pusat yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

2. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo maka tema pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan provinsi selain juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan disinergikan kebijakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat padab Tabel TC.33, sebagai berikut:

Tabel TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Probolinggo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	00	01	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01	00	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesekretariatan Yang Dilaksanakan	Kabupaten Probolinggo	100 %	4.147.096.550,00	PAD, DAU, DBH		100 %	4.147.096.550,00
8.01	00	01	01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun	Kabupaten Probolinggo	100 %	123.000.000,00	PAD		100 %	123.000.000,00
8.01	00	01	01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kabupaten	10	70.000.000,00	PAD		10 dokumen	70.000.000,00

				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Probolinggo	dokumen					
8.01	00	01	01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	Kabupaten Probolinggo	1 dokumen	7.500.000,00	PAD		1 dokumen	7.500.000,00
8.01	00	01	01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terusun	Kabupaten Probolinggo	1 dokumen	7.500.000,00	PAD		1 dokumen	7.500.000,00
8.01	00	01	01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	Kabupaten Probolinggo	1 dokumen	7.500.000,00	PAD		1 dokumen	7.500.000,00
8.01	00	01	01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	Kabupaten Probolinggo	1 dokumen	7.500.000,00	PAD		1 dokumen	7.500.000,00
8.01	00	01	01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	Kabupaten Probolinggo	4 kali	15.000.000,00	PAD		4 kali	15.000.000,00
8.01	00	01	01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	4 kali	8.000.000,00	PAD		4 kali	8.000.000,00

				Daerah									
8.01	00	01	01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Tersusun	Dokumen Keuangan	Kabupaten Probolinggo	100 %	2.756.256.275,00	PAD, DAU		100 %	2.756.256.275,00
8.01	00	01	01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Probolinggo	22 orang	2.741.256.275,00	DAU		22 orang	2.741.256.275,00
8.01	00	01	01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD	Akuntansi	Kabupaten Probolinggo	4 kali	7.000.000,00	PAD		4 kali	7.000.000,00
8.01	00	01	01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang diselesaikan		Kabupaten Probolinggo	4 kali	8.000.000,00	PAD		4 kali	8.000.000,00
8.01	00	01	01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kedisiplinan Pegawai	Pemenuhan Pendukung	Kabupaten Probolinggo	100 %	202.000.000,00	PAD		100 %	202.000.000,00
8.01	00	01	01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kabupaten	1 kali	202.000.000,00	PAD		1 kali	202.000.000,00

				Peraturan Perundang- Undangan		Probolinggo							
8.01	00	01	01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pendukung perkantoran	Ketersediaan layanan	Kabupaten Probolinggo	100 %	365.475.000,00	PAD		100 %	365.475.000,00
8.01	00	01	01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Probolinggo	12 bulan	97.750.000,00	PAD		12 bulan	97.750.000,00
8.01	00	01	01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kabupaten Probolinggo	12 bulan	5.000.000,00	PAD		12 bulan	5.000.000,00
8.01	00	01	01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Probolinggo	12 bulan	11.500.000,00	PAD		12 bulan	11.500.000,00
8.01	00	01	01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kabupaten Probolinggo	12 bulan	20.650.000,00	PAD		12 bulan	20.650.000,00
8.01	00	01	01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kabupaten Probolinggo	12 bulan	230.575.000,00	PAD		12 bulan	230.575.000,00

				Konsultasi SKPD								
8.01	00	01	01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	100 %	521.515.275,00	PAD, DAU		100 %	521.515.275,00
8.01	00	01	01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	12 bulan	12.275.000,00	PAD		12 bulan	12.275.000,00
8.01	00	01	01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	12 bulan	64.720.275,00	DAU		12 bulan	64.720.275,00
8.01	00	01	01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	12 bulan	98.000.000,00	PAD		12 bulan	98.000.000,00
8.01	00	01	01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	12 bulan	346.520.000,00	DANA BAGI HASIL, PAD		12 bulan	346.520.000,00
8.01	00	01	01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kabupaten	100 %	178.850.000,00	PAD		100 %	178.850.000,00

				Barang Milik Daerah Penunjang	Pemerintahan Daerah Terpelihara	Daerah Probolinggo						
8.01	00	01	01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	12 bulan	103.850.000,00	PAD		12 bulan	103.850.000,00
8.01	00	01	01.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan (pengadaan/penyempurnaan) Aset Tak Berwujud	Kabupaten Probolinggo	2 kali	75.000.000,00	PAD		2 kali	75.000.000,00
8.01	00	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		95 %	1.533.275.000,00	PAD, SILPA		95 %	1.533.275.000,00
8.01	00	01	02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Kabupaten	95 %	1.533.275.000,00	PAD, SILPA		95 %	1.533.275.000,00

				Karakter Kebangsaan	Kebangsaan	Probolinggo						
8.01	00	01	02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	8 kali	455.000.000,00	PAD, SILPA		8 kali	455.000.000,00
8.01	00	01	02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Probolinggo	12 kali	1.078.275.000,00	PAD		12 kali	1.078.275.000,00
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang		95 %	3.716.825.000,00	PAD, SILPA		95 %	3.716.825.000,00

8.01	00	01	03	Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik							
8.01	00	01	03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Probolinggo	95 %	3.716.825.000,00	PAD, SILPA		95 %	3.716.825.000,00
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Kabupaten Probolinggo	6 kali	2.616.825.000,00	PAD, SILPA		6 kali	2.616.825.000,00

8.01	00	01	03.2.01.03	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							
8.01	00	01	03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	11 kali	1.100.000.000,00	PAD		11 kali	1.100.000.000,00
8.01	00	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		95 %	352.500.000,00	PAD		95 %	352.500.000,00

					Kemasyarakatan							
8.01	00	01	04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Probolinggo	95 %	352.500.000,00	PAD		95 %	352.500.000,00
8.01	00	01	04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah sosialisasi terhadap Ormas/LSM/Toga/Tomas di bidang Kebijakan, dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Probolinggo	6 kali	180.000.000,00	PAD		6 kali	180.000.000,00
8.01	00	01	04.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Probolinggo	5 kali	172.500.000,00	PAD		5 kali	172.500.000,00

				Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8.01	00	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		95 %	1.869.800.000,00	PAD, SILPA		95 %	1.869.800.000,00
8.01	00	01	05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Probolinggo	95 %	1.869.800.000,00	PAD, SILPA		95 %	1.869.800.000,00
8.01	00	01	05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kabupaten Probolinggo	10 kali	765.800.000,00	PAD, SILPA		10 kali	765.800.000,00

				Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	di Daerah							
8.01	00	01	05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Probolinggo	8 kali	1.104.000.000,00	PAD		8 kali	1.104.000.000,00
8.01	00	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		95 %	515.400.000,00	PAD		95 %	515.400.000,00

8.01	00	01	06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ormas/LSM/Toga/ Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Probolinggo	95 %	515.400.000,00	PAD		95 %	515.400.000,00
8.01	00	01	06.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	6 kali	320.100.000,00	PAD		6 kali	320.100.000,00
				Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kabupaten	6 kali	172.800.000,00	PAD		6 kali	172.800.000,00

8.01	00	01	06.2.01.04	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Probolinggo						
8.01	00	01	06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	Jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan terkait Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Probolinggo	5 kali	22.500.000,00	PAD		5 kali	22.500.000,00

				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01	00	01	06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	4 dokumen	200.000.000,00	PAD		4 dokumen	200.000.000,00
Jumlah								12.334.896.550,00				12.334.896.550,00

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAKESBANGPOL

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Probolinggo mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2018-2023, yang telah memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagai pilar Pemerintah memiliki peran Menumbuhkan kebersamaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang damai, tentram, terlindungi hak dan kewajibannya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Dalam rangka mewujudkan visi Misi Bupati Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2018-2023) akan mengemban visi Pembangunan Daerah (Visi Bupati Terpilih) Tahun 2018-2023.

Visi Bupati Probolinggo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING“

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, yaitu meningkatnya toleransi antar umat beragama melalui Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan indikator tujuan mengacu pada indikator tujuan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Sasaran (objective) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun selama kurun waktu lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- b. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

Unsur Pemerintahan Umum :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Kegiatan :

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan Kegiatan :

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif APBD	Catatan Penting
1	2	3	4
8.01.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.147.096.550,00	
8.01.00.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	7.500.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	7.500.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.756.256.275,00	
8.01.00.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.741.256.275,00	
8.01.00.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.000.000,00	

8.01.00.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	202.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.475.000,00	
8.01.00.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.750.000,00	
8.01.00.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.500.000,00	
8.01.00.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.650.000,00	
8.01.00.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.575.000,00	
8.01.00.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.515.275,00	
8.01.00.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.275.000,00	
8.01.00.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.720.275,00	
8.01.00.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.000.000,00	
8.01.00.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.520.000,00	
8.01.00.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	178.850.000,00	
8.01.00.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.850.000,00	
8.01.00.01.01.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	75.000.000,00	
8.01.00.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.533.275.000,00	
8.01.00.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.533.275.000,00	
8.01.00.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	455.000.000,00	
8.01.00.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.078.275.000,00	
8.01.00.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.716.825.000,00	

8.01.00.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.716.825.000,00	
8.01.00.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.616.825.000,00	
8.01.00.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.100.000.000,00	
8.01.00.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	352.500.000,00	
8.01.00.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	352.500.000,00	
8.01.00.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.000.000,00	
8.01.00.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	172.500.000,00	
8.01.00.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.869.800.000,00	
8.01.00.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.869.800.000,00	
8.01.00.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	765.800.000,00	
8.01.00.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.104.000.000,00	
8.01.00.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	515.400.000,00	
8.01.00.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	515.400.000,00	
8.01.00.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	320.100.000,00	

	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8.01.00.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	172.800.000,00	
8.01.00.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22.500.000,00	
8.01.00.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
	J U M L A H	12.334.896.550,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD), dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Probolinggo, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009